



# TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA KEKINIAN

Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif

Editor :

Winda Hardyanti  
Demeiati Nur Kusumaningrum



# TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA

## Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif

**Editor**

Winda Hardyanti  
Demeiati Nur Kusumaningrum

---

# TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA KEKINIAN

## Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif

---

Penulis : Rachmad K. Dwi Susilo  
Oman Sukmana  
Najamuddin Khairur Rijal  
Asep Nurjaman  
Gonda Yumitro  
Listiana Asworo  
Saiman  
Ana Cordeiro  
Dion Maulana Prasetya  
Demeiati Nur Kusumaningrum  
Shannaz Mutiara Deniar  
Budi Suprpto

Design : Elin W

### **Penerbit Gre Publishing**

Jln. Kelurahan  
Karangwaru Lor TR II/211E Yogyakarta - Indonesia  
<http://grepublishing.com>

bekerjasama dengan:

**Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP)**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang

ISBN 978-602-7677-42-5

---

Dilarang keras mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

# Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera,

Alhamdulillah atas nikmat kesehatan dan waktu yang bermanfaat, akhirnya buku kumpulan karya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dapat diterbitkan.

Selamat saya ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah berkenan menyajikan gagasan dan kajian kritisnya terhadap isu-isu kontemporer yang menarik ini. Terima kasih atas kinerja tim Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) dalam dua tahun ini mampu menggugah gairah menulis dan membangun iklim akademik yang berkemajuan di lingkungan FISIP.

Mudah-mudahan semangat berbagi dan berkarya dosen-dosen FISIP tetap menyala dan hasil dari kajian kritis dalam buku ini dapat memberikan makna positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang sosial humaniora.

Salam sukses dan selamat membaca.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, Desember 2017

Dekan FISIP UMM  
Dr. Rinikso Kartono, M.Si



# PENDAHULUAN

**B**erada pada sebuah era digitalisasi, dimana semua negara, tak terkecuali negara berkembang, saat ini tengah mengalami tantangan yang beraneka ragam. Mulai dari tantangan di bidang ekonomi, politik, ideologi, hingga tantangan dalam bidang hubungan antar negara. Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang pun tak lepas dari geliat tantangan-tantangan tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah tantangan di bidang ekonomi, khususnya ketika menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disingkat MEA. MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Pasar tunggal dan basis produksi melalui skema MEA diyakini mendorong kawasan Asia Tenggara lebih dinamis dan berdaya saing dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. Ini menjadi tantangan tersendiri, tak terkecuali bagi para *social worker* di Indonesia. Solusi menghadapi tantangan ini diungkap dalam sebuah artikel dalam buku ini yang berjudul Peluang dan Tantangan Bagi Social Worker Indonesia dalam Menghadapi Era MEA.

Selain tantangan menghadapi MEA, pasca reformasi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal gerakan revivalisme Islam serta dalam hal stabilitas sistem kepartaian di Indonesia mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pasca reformasi, kran kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk berpolitik, berkumpul dan berpendapat dibuka seluas-luasnya, termasuk terhadap gerakan Islam. Sejak itu, berbagai gerakan Islam transnasional, partai politik, dan ajaran yang mengintegrasikan dengan budaya lokal muncul dan tumbuh pesat. Hanya saja dalam perkembangan terkini kondisi yang disebut sebagai revivalisme ini menghadapi banyak persoalan, termasuk kelemahan mereka dalam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi persoalan riil di tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit di antara aktivis Islam yang terjebak dengan tindakan-tindakan pragmatis yang jauh dari nilai-nilai Islam sebagaimana yang mereka suarakan. Dalam hal sistem kepartaian di Indonesia, sejumlah partai besar di Indonesia juga mengalami penurunan perolehan suara yang cukup signifikan. Realitas ketidakstabilan perolehan suara partai (*electoral volatility*) secara individual menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia pasca Orde Baru hingga saat ini masih tidak stabil. Selain itu adanya pergeseran terkait konsep keamanan negara yang dulunya berfokus pada *state security* dan kini mengarah ke *human security* juga menimbulkan tantangan tersendiri. Konsep atau gagasan *human security* melahirkan banyak interpretasi yang akhirnya memunculkan perdebatan. Sejumlah artikel dalam buku ini mengupas berbagai tantangan tersebut dan berupaya untuk mendiskusikan solusi bagaimana tantangan Indonesia dalam bidang politik yang dikaji dalam sejumlah perspektif menarik dari sudut pandang keilmuan sosial, politik, pemerintahan, komunikasi dan juga perspektif hubungan internasional.

Buku bunga rampai ini sejatinya adalah sebuah kolaborasi menarik dari sejumlah pemikir kajian sosial politik, komunikasi dan hubungan internasional yang mencoba untuk menelaah bagaimana seharusnya Indonesia bisa menempatkan posisinya sebagai negara yang tak terlepas dari tantangan-tantangan di era digitalisasi seperti saat ini. Tujuan buku ini adalah untuk mengelaborasi bagaimana posisi negara kita dan

apa saja solusi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan bersama kita mewujudkan Indonesia sebagai negara bermartabat, demi terciptanya Indonesia Berkemajuan.

**Editor,**  
Winda Hardyanti





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Pendahuluan.....	v
Daftar Isi .....	ix

Peluang dan Tantangan <i>Social Worker</i> Indonesia Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) <b>Oman Sukmana</b> .....	1
Tantangan Pancasila dalam Tafsir Kosmopolitanisme <b>Najamuddin Khairur Rijal</b> .....	19
Stabilitas Sistem Kepartaian Indonesia Pasca Orde Baru <b>Asep Nurjaman</b> .....	39
Model dan Perkembangan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia Pasca Reformasi <b>Gonda Yumitro</b> .....	61
Menembus Ortodoksi Paradigma 'Keamanan' : Melampaui <i>State Security</i> Menuju Urgensi <i>Human Security</i> <b>Listiana Asworo</b> .....	79
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu ( <i>Integrated Water Resource Management</i> ) untuk Konservasi Air di Kota Batu, Jawa Timur <b>Rachmad K. Dwi Susilo</b> .....	97

<i>Electronic Government</i> Pada Pemerintah daerah Menuju <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik <b>Saiman</b> .....	115
<i>Traditions: keeping the balance between the old and the new</i> <i>(A study on the abstract notion of Portuguese traditional</i> <i>culture )</i> <b>Ana Cordeiro</b> .....	135
Kebangkitan “Aseng”? Studi Sejarah tentang Muncul dan Berkembangnya Konflik Etnis Jawa-Tionghoa <b>Dion Maulana Prasetya</b> .....	147
Harmonisasi ASEAN Membangun Identitas Regional <b>Demeiati Nur Kusumaningrum &amp;</b> <b>Shannaz Mutiara Deniar</b> .....	163
Kerangka Kerja Komunikasi Politik dan Peranan Media Massa <b>Budi Suprpto</b> .....	179
Biodata Penulis.....	201

# Harmonisasi ASEAN Membangun Identitas Regional

Oleh: Demeiati Nur Kusumaningrum & Shannaz Mutiara Deniar

Tahun 2017, tepat 50 tahun sejak ASEAN pertama kali didirikan yang diprakarsai oleh lima negara di Asia Tenggara pada tahun 1967. Serta memasuki tahun kedua dalam tonggak baru dalam kerjasama ASEAN menuju organisasi regional yang terintegrasi dalam *ASEAN Community* (Masyarakat ASEAN). Masyarakat ASEAN yang telah berusia dua tahun bertujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, saling peduli serta melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Pencapaian ASEAN tidak terlepas dari kerjasama dan kontribusi para negara anggota.

Dalam rangkaian peringatan 50 tahun ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-30 tahun ini diadakan pada 28-29 April 2017 dengan Filipina sebagai tuan rumah. Dengan tema “*Partnering for Change, Engaging the World*”, KTT tahun 2017 memfokuskan pada pembahasan keamanan dan kerjasama maritim, stabilitas dan perdamaian kawasan, ketahanan ASEAN, pertumbuhan inklusif berdasar inovasi, serta ASEAN sebagai model regionalisme kawasa

Pada usia 50 tahun ini, ASEAN berada ditengah konflik sengketa laut di Tiongkok Selatan. Diharapkan pada KTT ke-30, adanya kemajuan dalam penandatanganan Deklarasi Kode Etik Tata Kelakuan Baik (DOC). Namun, Presiden Duterte menyatakan bahwa persoalan ini tidak akan dibahas karena isu sengketa bukanlah isu ASEAN. Selain itu, juga dibahas mengenai eskalasi di Semenanjung Korea. Pasca pergantian

presiden Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, situasi keamanan di kawasan ini memanas dengan komen dan respon dari dua pemimpin negara Amerika dan Korea Utara. Uji coba peluncuran rudal Korea Utara semakin mengkhawatirkan negara tetangga Jepang dan Korea Selatan. Korea Utara mengirim surat pada Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menggalang dukungan, sementara itu para pemimpin ASEAN sepakat agar Korea Utara mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Perjalanan sejarah perkembangan ASEAN begitu dinamis. Saat ini ASEAN menjadi salah satu organisasi regional yang berperan aktif dalam arena politik internasional. Adapun tulisan ini tertarik untuk membahas tentang perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional dan perannya dalam konteks keamanan internasional. Hal ini merujuk pada sejarah pembentukan ASEAN, realisasi visi misi ASEAN dan tantangan ASEAN sebagai organisasi regional yang berperan dalam mewujudkan keamanan internasional.

## REALISASI VISI DAN MISI ASEAN

ASEAN dibangun dengan visi dan misi yang mapan dan menunjukkan itikad baik terhadap kemajuan kawasan Asia Tenggara. Adapun visi dan misi ASEAN adalah (ASEAN, n.d.); 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan untuk sebuah komunitas negara-negara Asia Tenggara yang makmur dan damai. 2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antara negara-negara kawasan dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB. 3) Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan bidang administrasi. 4) Saling memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknik dan administrasi. 5)

Meningkatkan kerjasama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari bidang-bidang pertanian dan industri, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi dan meningkatkan standar hidup rakyat mereka. 6) Memajukan pengkajian atau studi Asia Tenggara, dan 7) Memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua kemungkinan kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri.

Visi dan misi serta prinsip-prinsip dasar ASEAN dijadikan sebagai pedoman dalam hubungan internasional negara-negara Asia Tenggara baik di dalam relasi intra-kawasan maupun komunitas dunia internasional pada umumnya. Hal inilah yang menjadi semangat negara-negara ASEAN untuk mewujudkan kerjasama dan saling pengertian yang melandasi kerjasamanya di berbagai bidang, khususnya ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan.

Pada KTT pertama ASEAN di Bali tahun 1976, dibahas beberapa hal penting sebagai dasar kerangka kerja sama ASEAN yakni berisi Program Aksi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penerangan, dan peningkatan mekanisme ASEAN. Selain itu juga disepakati prinsip fundamental ASEAN dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara/ *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC) pada tahun 1976, yang berisi: 1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional tiap negara; 2) Hak setiap negara atas kehadiran nasionalnya yang bebas dari campur tangan, subversif, atau pemaksaan pihak luar; 3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota; 4) Penyelesaian perbedaan atau perselisihan secara damai; 5) Penolakan penggunaan ancaman dan kekerasan; dan 6) Kerjasama efektif antara anggota

Dalam perkembangannya untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, saling peduli serta

melindungi hak asasi dan keadilan sosial di tahun 2020 yang tercantum dalam Visi ASEAN 2020 dalam KTT ASEAN 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk mewujudkannya, disepakati Bali Concord II yang berisi pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) dengan tiga pilar yakni pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*), dan pilar Masyarakat Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Pilar Politik-Keamanan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik keamanan antar anggota, memastikan perdamaian regional yang berkeadilan, berdemokrasi, dan harmonis; Pilar Ekonomi sebagai entitas ekonomi terpadu Asia Tenggara bertujuan meningkatkan stabilitas perekonomian kawasan; dan yang terakhir Pilar Sosial-Budaya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ASEAN dengan kesamaan identitas yang bertanggungjawab secara sosial membangun kesejahteraan, solidaritas, dan persatuan antar negara anggota. Ketiganya saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama.

Untuk mempertegas pembentukan Masyarakat ASEAN, disetujui pembentukan Tiga Rencana Aksi dalam *Vientiane Action Program* (VAP) yang berisi tentang program pelaksanaan jangka pendek dan menengah periode 2004-2010. Pembentukan Masyarakat ASEAN disambut baik oleh seluruh negara anggota. Didukung oleh harapan dan antusiasme, dirumuskanlah Deklarasi Cebu pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina yang berisi Percepatan Pembentukan Masyarakat ASEAN yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015. ASEAN kemudian menyusun Cetak Biru Masyarakat ASEAN dari ketiga pilar tersebut. Cetak Biru ini disahkan oleh negara anggota melalui KTT: Cetak Biru Masyarakat Ekonomi disahkan pada KTT ke-13 tahun 2007 di Singapura, kemudian Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan dan Masyarakat Sosial Budaya disahkan pada KTT ke-14 tahun 2009 di Thailand. Dalam perjalanannya diperlukan komitmen untuk merumuskan lagi visi Masyarakat ASEAN setelah 2015 yang kemudian disepakati pada KTT ke-23 tahun 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

## ROAD MAP POLITIK KERJASAMA ASEAN

ASEAN mencoba menguatkan integrasi kawasan dengan kerjasama ekonomi yang diharapkan dapat menjadi prospek kemajuan kawasan. Di awal pembentukan ASEAN, kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint venture*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti *ASEAN Industrial Projects Plan* (1967), *Preferential Trading Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement* (1987) (Dirgantara, 2010). Hal ini berseberangan dengan negara-negara belahan dunia lain pada dekade 1980-1990an yang melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi. Negara-negara di ASEAN justru cenderung membuka perekonomian mereka.

Dinamika kerjasama ekonomi ASEAN berkembang dalam kerangka kerjasama pasar bebas. Pada dekade 1970an kerjasama ekonomi kawasan memfokuskan pada kerjasama bidang industri yang diperkuat pada dekade 1990an. Pasca krisis 1980an pemulihan dilakukan dengan suatu langkah signifikan serta menjawab tantangan globalisasi. ASEAN Free Trade Area (AFTA) dibentuk pada tahun 1992, sebuah hasil dari KTT ke-5 ASEAN di Singapura ditandai dengan liberalisasi tarif dilanjutkan dengan memberlakukan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama tanggal 1 Januari 1993. Sama halnya dengan sistem kerja blok ekonomi regional lainnya, AFTA memberikan fasilitas pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan dan investasi. ASEAN diharapkan dapat menjadi salah satu pusat ekonomi dunia, dimana negara-negara ASEAN merupakan pasar potensial bagi produksi global dengan geoekonomi yang strategis.



Di samping AFTA, pada tahun 1995 ASEAN juga telah menandatangani *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) untuk membuka pasar jasa-jasa di kawasan ASEAN dan sebuah skema kerja sama baru di bidang industri yaitu *ASEAN Industrial Cooperation* (AICO), dimana insentif yang diberikan sebatas pada pemberian preferensi tarif yang semakin berkurang, artinya karena menurunnya tarif MFN (Dirgantara, 2010).

Pasca Krisis Moneter Asia tahun 1997, ASEAN terus melanjutkan agenda integrasi kerjasama ekonomi dengan ditandatanganinya *Framework Agreement on ASEAN Investment Area* (AIA) pada bulan Oktober 1998 untuk meningkatkan daya tarik investasi yang lebih kompetitif dan terbuka melalui suatu persetujuan yang mengikat. Kemudian pada KTT ke-9 di Bali tahun 2003, para pemimpin negara ASEAN menyetujui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan ditandatanganinya *Bali Concord II*. Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas (Cipto, 2006). Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dapat dikatakan untuk menciptakan *a single market and production base*. Kawasan yang terintegrasi penuh secara ekonomi, kecuali bidang keuangan dan moneter. Komitmen negara anggota terus berlanjut hingga melalui Krisis Finansial Global 2008-2009 dengan disepakatinya *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) tahun 2009, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2012, dan pengadopsian *ASEAN Financial Integration Framework* tahun 2011.

Dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, proses integrasi ekonomi kawasan menjadi semakin nyata. Empat karakteristik MEA adalah pertama, pasar tunggal dan basis produksi; kedua, kawasan berdaya saing tinggi; ketiga, pertumbuhan ekonomi merata; dan keempat, kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global. Dengan pencapaian Cetak Biru MEA 2015 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian ASEAN membaik sejalan dengan implementasi Cetak Biru MEA 2015 (Diangga, 2016). Konektivitas ASEAN

(*ASEAN Connectivity*) dianggap sebagai faktor penunjang dalam perwujudan kondisi tersebut. Konektivitas ASEAN diatur dalam *Hanoi Declaration on the Adoption of the Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pembangunan, mendorong proses integrasi, meningkatkan daya saing, serta mendorong keterhubungan antar masyarakat. Ada tiga pilar konektivitas yakni konektivitas fisik yang berpusat pada pembangunan infrastruktur; konektivitas institusional dalam hal fasilitas perdagangan, investasi, dan mobilisasi; dan terakhir konektivitas *people-to-people* untuk pengembangan SDM, pertukaran budaya, dan pengembangan industri pariwisata. Pada KTT ke-28 dan 29, ASEAN sepakat untuk mewujudkan MPAC 2025/*ASEAN Connectivity 2025*.

## KERJASAMA POLITIK-KEAMANAN ASEAN

Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan pada awalnya dibingkai oleh konsep Kawasan damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality – ZOPFAN*). Kerjasama ini digagas oleh Pertemuan Khusus para Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur pada November 1971. ZOPFAN merupakan upaya negara-negara ASEAN mewujudkan prinsip-prinsip Deklarasi Bangkok yang menekankan pada perdamaian dan stabilitas kawasan sesuai dengan norma-norma Piagam PBB. ZOPFAN tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara namun juga mencakup Asia Pasifik. ZOPFAN juga diharap dapat melibatkan negara-negara major powers dalam penanganan keamanan kawasan yang berpedoman pada tindakan menahan diri secara sukarela (*voluntarily self-restraints*) termasuk tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara, menolak penggunaan kekerasan, dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam perkembangan sejarahnya, kerjasama ini semakin meningkat dengan ditandatanganinya Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia – TAC*) pada KTT ASEAN I di Bali tahun 1976 yang

menyepakati pentingnya hak kedaulatan nasional, non intervensi dan penyelesaian sengketa kawasan secara damai.

Adapun untuk menindaklanjuti kesepakatan tentang politik keamanan kawasan, dibentuklah *ASEAN Regional Forum* (ARF) pada KTT ASEAN IV tahun 1992. ARF bertujuan untuk (1) mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, dan (2) memberikan kontribusi positif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan rasa saling percaya (*confidence building*) dan diplomasi di kawasan Asia Pasifik. ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti; Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (UE). ARF menyepakati bahwa konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu keamanan non-tradisional lainnya (ASEAN Secretariat, n.d.).

Perkembangan konsep politik keamanan ASEAN semakin luas dan berusaha menjawab tantangan zaman. Pengaruh komunitas internasional dengan rezim non-proliferasi nuklir juga turut membawa negara-negara ASEAN untuk menaruh perhatian pada isu ancaman kepemilikan senjata pemusnah massal tersebut. Oleh sebab itu, pada KTT ASEAN V tahun 1995, negara-negara ASEAN menandatangani Traktat mengenai Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara yang dikenal dengan *Treaty on South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ).

Dalam operasi penjaga perdamaian, para Menteri Pertahanan sepakat membentuk *ASEAN Peacekeeping Centres Network*. Jaringan ini akan memfasilitasi kerja sama dalam perdamaian antar semua anggota ASEAN. Kerja sama ini akan menghasilkan perencanaan, pelatihan, dan pertukaran pengalaman untuk operasi penjagaan perdamaian. Sementara dalam isu penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, ADMM memandang pentingnya membangun ketahanan

terhadap kesiapan tanggap bencana. ADMM telah berkomitmen untuk mengintensifkan kerja sama praktis untuk operasi efektif. Pertemuan ini juga menyebutkan Indonesia-Singapura akan menjadi tuan rumah bersama *ASEAN Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR). Sedangkan terkait pada keamanan maritim, platform kerjasama maritim ASEAN terbentuk dalam *ASEAN Maritime Forum* (AMF), salah proses penting yang tercantum dalam Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN. Forum ini membahas isu maritim khususnya terkait dengan kejahatan lintas negara. Negara ASEAN juga berkomitmen secara penuh dan efektif melaksanakan Deklarasi Tentang Pelaksanaan Pengamanan di Laut China Selatan dan penerapan kode etik regional di Laut China Selatan.

Dalam ancaman stabilitas keamanan yakni kejahatan lintas negara (trans-national crimes), ASEAN memiliki rencana yang terpadu untuk memberantas kejahatan yang berfokus pada delapan bidang yakni terorisme, pencucian uang, pembajakan kapal, penyelundupan senjata, perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, cyber crimes dan economic crimes. Upaya kolektif yang dilakukan ASEAN untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan adalah prioritas karena merupakan '*condition sine qua non*' atau prasyarat bagi kelanjutan pembangunan ekonomi dan kemakmuran di kawasan (Dit. Politik Keamanan ASEAN, 2015).

## TANTANGAN & HARAPAN ASEAN DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN HARMONISASI KAWASAN

Negara-negara anggota ASEAN telah lama mendambakan stabilitas politik dan keamanan regional Asia Tenggara yang diharapkan dapat membawa masa depan kawasan yang damai dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Hal ini terjawab dengan pembentukan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk

memotivasi negara anggota untuk hidup damai satu sama lain dan mewujudkan komunitas internasional yang adil, demokratis dan harmonis. Negara-negara anggota menyepakati usaha-usaha penyelesaian konflik secara damai dalam mengatasi perbedaan intra-regional. Politik-keamanan ASEAN dianggap sebagai suatu hal yang fundamental, karena kesamaan posisi geografis, visi dan misi sebagai negara anggota dalam satu kawasan.

Cetak-biru kesepakatan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN mengharapakan ASEAN menjadi kerangka kerja berbasis nilai-nilai dan norma-norma bersama; wilayah yang kohesif, damai, stabil dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keamanan komprehensif; serta kawasan yang dinamis dan berwawasan ke luar-dalam (*outward-looking*), semakin terintegrasi dan saling bekerjasama satu sama lain. Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN berbasis pada Piagam ASEAN dan prinsip-prinsip serta tujuan yang terkandung di dalamnya. Kesepakatan ini menyediakan jalan dan jadwal untuk merealisasikan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN. Sehingga perlu usaha-usaha yang lebih besar dalam mewujudkan APSC termasuk dalam penyelesaian kasus-kasus global yang melanda Asia Tenggara saat ini.

Pada dewasa ini masalah politik-keamanan Asia Tenggara khususnya yang menjadi fokus kejasama ASEAN tidak hanya berupa ancaman yang bersifat tradisional (militeristik) misalnya tentang masalah perbatasan namun juga telah merambah pada isu-isu *human security*, seperti; terorisme, degradasi lingkungan, perdagangan manusia, penyebaran penyakit menular (SARS, AIDS, dll.) dan juga hak kekayaan budaya. Isu-isu di atas kadang kurang mendapat perhatian yang serius namun dampaknya dapat memicu konflik dan ketegangan internasional.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki keterikatan fungsional berdasarkan letak geografisnya. Begitu juga dengan sejarah dan latar belakang sosial budaya yang membawa mereka membentuk suatu organisasi regional. Keberagaman negara-negara ASEAN yang multi etnis, agama, ras dan budaya pada akhirnya mendorong pemerintah masing-masing negara pada

kebijakan ideologis tertentu. Hal ini sangat disadari oleh para kepala negara anggota ASEAN, bahwa tidak mudah mengintegrasikan negara-negara Asia Tenggara secara politik seperti Uni Eropa.

Banyak persoalan yang muncul sebagai isu kawasan yang membutuhkan dialog lebih lanjut dalam forum-forum ASEAN, perselisihan antara Thailand dan Kamboja tentang perbatasan. Pada KTT ASEAN ke-18 di Jakarta telah mencoba untuk memediasi sengketa antara kedua negara dan membawa mereka untuk melakukan langkah awal pada perundingan bilateral. Meskipun banyak pihak menyangsikan kontribusi ASEAN ini terhadap penyelesaian sengketa Thailand dan Kamboja, usaha membawa kedua negara duduk bersama dalam forum dan menegosiasikan penyelesaian konflik dalam kerangka ASEAN adalah sebuah langkah yang positif. Isu yang marak baru-baru ini adalah mengenai tragedi kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar. Kasus ini menjadi sorotan baik level bilateral, regional, maupun dunia internasional. Walau dengan reaksi yang begitu keras dari berbagai pihak, terkendalanya penyelesaian masalah ini adalah dengan adanya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Komitmen para pemimpin ASEAN juga dianggap masih bersifat normative sehingga persoalan kemanusiaan masih dikesampingkan (Yumitro, 2017). Sesuai prinsip dalam semangat kerjasama ASEAN, negara-negara anggota memegang nilai saling menghormati hak kedaulatan meskipun penyelesaian sengketa sangat diharapkan dapat melalui jalan damai. ASEAN di sini masih berperan sebagai forum yang menjadi rujukan negara-negara Asia Tenggara untuk penyelesaian isu-isu kawasan. Dalam pengupayaan penyelesaian masalah Rohingya misalnya, ASEAN dapat menggunakan dua lembaga yang telah dibentuk yakni *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dan *ASEAN Humanitarian Assistance* (AHA) *Centre for disaster management*. Meskipun hasil dari sengketa Thailand-Kamboja ataupun krisis di Myanmar tersebut masih dalam proses dan analisa yang lebih mendalam. Tidak dapat dipungkiri bahwa dorongan dan motivasi dari negara-negara

anggota ASEAN yang lain sangat membantu dalam mewujudkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Jika kita tilik lebih jauh, pertemuan-pertemuan dalam serangkaian kegiatan KTT ASEAN lebih sering membahas isu-isu global yang lebih bersifat *'cover'*. Kasus-kasus spesifik yang sempat menggemparkan media nasional dan memunculkan emosi masyarakat Indonesia adalah isu perdagangan manusia dalam masalah TKI dan TKW yang dikirimkan ke Malaysia. Masalah tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan tidak manusiawi telah menyakiti hati publik. Sempat terjadi demo-demo di daerah yang menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kontrak-kontrak yang tidak adil dan menindas semua jaringan perdagangan manusia termasuk perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja yang tidak bertanggungjawab. Dalam skala internasional, masyarakat Indonesia juga menuntut pemerintah untuk menegosiasikan kebijakan kerjasama ketenagakerjaan yang lebih memihak terhadap harkat dan martabat bangsa kita.

Ketegangan ini sempat menghasilkan kebijakan deportasi besar-besaran terhadap tenaga kerja –ilegal- Indonesia di Malaysia. Para imigran dipulangkan ke Indonesia karena keberadaannya di Malaysia telah melanggar hukum nasional. Pemerintah juga berusaha menekan pemerintah Malaysia untuk mengadili pada pelaku penganiayaan tenaga kerja Indonesia dan menegosiasikan kontrak yang lebih adil. Adapun sengketa tentang tenaga kerja ini pada kenyataannya khusus dibahas secara bilateral tanpa melibatkan forum-forum ASEAN. Namun masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia menyadari sepenuhnya terhadap posisi mereka sebagai negara pendiri ASEAN dan berusaha melakukan perundingan-perundingan damai demi meredakan ketegangan di kawasan.

Tidak jauh berbeda dengan kasus Indonesia dan Singapura, sebagai negara yang bertetangga dalam regional ASEAN. Ada beberapa kasus yang sempat menjadi perbincangan hangat seperti isu reklamasi pantai dan kebakaran hutan. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Singapura

sampai saat ini sedang melaksanakan mega proyek perluasan wilayah daratan demi menjawab tantangan demografi dan pariwisata. Singapura sebagai negara terkecil di Asia Tenggara dengan luas sekitar 581 km persegi sebelum tahun 1960, pada tahun 2010 diperkirakan sudah bertambah luasnya menjadi 820 km persegi (Asia Times, 2003). Kalangan politisi dalam negeri menilai bahwa perluasan daratan Singapura berpengaruh cukup signifikan pada garis batas teritorial Indonesia. Hal itulah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra.

Secara politis kasus reklamasi pantai Singapura memang menimbulkan ketegangan nasional, namun di sisi lain Indonesia hingga tahun ini masih merupakan turis terbesar dari pariwisata Singapura yang memberikan kontribusi secara ekonomi. Begitu juga dengan masalah kebakaran hutan yang sering melanda beberapa wilayah Indonesia. Dalam arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Pengendalian Hutan dan Lahan tahun 2017 di Istana Jakarta menyatakan bahwa kebakaran tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (Sekretariat Kabinet RI, 2017), namun asap yang terjadi akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau sempat mengganggu aktivitas masyarakat Singapura. Pembicaraan-pembicaraan tingkat elit dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini. Di Indonesia sendiri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk satuan khusus penanganan bencana nasional yaitu BNPB. Kasus-kasus ini lambat laun terkikis oleh waktu dan tetap menjadi catatan pribadi publik Indonesia.

Tantangan lain dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara adalah aspek netralitas yang cenderung dipertanyakan. Menurut Dirjen Kerjasama ASEAN, Deplu RI (2006) Masyarakat ASEAN merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang negara-negara anggota agar lebih terbuka membahas permasalahan dalam negeri yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN seperti sikap saling menghormati, non intervensi, konsesus, dialog dan konsultasi bersama. Keinginan untuk berintegrasi dan harmonisasi secara utuh dalam regional ASEAN yang terbungkus dalam Masyarakat



ASEAN memiliki tantangan lain dari pengaruh kedekatan politis beberapa negara anggota ASEAN dengan negara-negara besar lainnya dalam komunitas internasional. Philipina hingga saat ini menjadi pangkalan militer Amerika Serikat (AS). Thailand juga membentuk kerjasama keamanan dengan AS. Begitu juga dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki kedekatan khusus dengan Inggris. Bagaimanapun, kemandirian ASEAN perlu dianalisa lebih mendalam demi kemajuan kawasan dan terwujudnya komunitas ASEAN di masa yang akan datang.

Kerjasama ASEAN pada dasarnya perlu ditingkatkan baik dalam fungsinya sebagai forum penyelesaian konflik kawasan maupun pada usaha-usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu masing-masing negara anggota perlu menanggalkan perbedaan-perbedaan ideologis, mencari persamaan positif dan berpikir ke depan untuk memperkuat kerjasama regional demi mewujudkan intergrasi Asia Tenggara dalam kerangka Masyarakat ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cipto, B. (2006). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirgantara, I. (2010, Juni 25). *Plan of Action ASEAN Security Community: Prospek dan Kendala*. Retrieved Juni 9, 2011, from Igor Dirgantara Personal Blog: <https://igordirgantara.wordpress.com/2010/06/25/plan-of-aaction-asean-security-community-prospek-kendala/>
- Antara. (2016, Mei 24). *Dubes ASEAN: Timor Leste Masuk ASEAN 2017*. Retrieved Oktober 18, 2017, from Antaranews Website: <http://www.antaranews.com/berita/562836/dubes-asean-timor-leste-masuk-asean-2017>
- ASEAN . (n.d.). *History: The Founding of ASEAN*. Retrieved Oktober 17, 2017, from ASEAN Official Website: <http://asean.org/asean/about-asean/history/>
- ASEAN. (n.d.). *About ASEAN: Aims and Purposes*. Retrieved Oktober 19, 2017, from ASEAN Official Website: <http://asean.org/asean/about-asean/>
- Diangga, I. M. (2016). *Masa Depan Pembangunan Konektivitas ASEAN*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Kerja Sama ASEAN. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Colbert, E. (1992). *Southeast Asian Regional Politics: Toward a Regional Order*. New York: Columbia University Press.
- ASEAN Secretariat. (n.d.). *About The ASEAN Regional Forum*. Retrieved Oktober 20, 2017, from ASEAN Regional Forum Official Website: <http://aseanregionalforum.asean.org/about.html>

- Sekretariat Kabinet RI. (2017, Januari 23). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved Oktober 20, 2017, from Arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017, 23 Januari 2017, di Istana Negara, Jakarta: <http://setkab.go.id/arahan-presiden-joko-widodo-pada-rakornas-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2017-23-januari-2016-di-istana-negara-jakarta/>
- Yumitro, G. (2017, July-December). Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya. *Jurnal Sospol*, 3(2), 81-100.
- Dit. Politik Keamanan ASEAN. (2015). *Perdamaian dan Stabilitas Keamanan: 'Conditio Sine Qua Non' Bagi Masyarakat ASEAN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI.

# TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA KEKINIAN

Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif

Selain tantangan menghadapi MEA, pasca reformasi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal gerakan revivalisme Islam serta dalam hal stabilitas sistem kepartaian di Indonesia mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pasca reformasi, kran kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk berpolitik, berkumpul dan berpendapat dibuka seluas-luasnya, termasuk terhadap gerakan Islam. Sejak itu, berbagai gerakan Islam transnasional, partai politik, dan ajaran yang mengintegrasikan dengan budaya lokal muncul dan tumbuh pesat. Hanya saja dalam perkembangan terkini kondisi yang disebut sebagai revivalisme ini menghadapi banyak persoalan, termasuk kelemahan mereka dalam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi persoalan riil di tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit di antara aktivis Islam yang terjebak dengan tindakan-tindakan pragmatis yang jauh dari nilai-nilai Islam sebagaimana yang mereka suarakan.

Dalam hal sistem kepartaian di Indonesia, sejumlah partai besar di Indonesia juga mengalami penurunan perolehan suara yang cukup signifikan. Realitas ketidakstabilan perolehan suara partai (*electoral volatility*) secara individual menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia pasca Orde Baru hingga saat ini masih tidak stabil. Selain itu adanya pergeseran terkait konsep keamanan negara yang dulunya berfokus pada state security dan kini mengarah ke human security juga menimbulkan tantangan tersendiri. Konsep atau gagasan human security melahirkan banyak interpretasi yang akhirnya memunculkan perdebatan. Sejumlah artikel dalam buku ini mengupas berbagai tantangan tersebut dan berupaya untuk mendiskusikan solusi bagaimana tantangan Indonesia dalam bidang politik yang dikaji dalam sejumlah perspektif menarik dari sudut pandang keilmuan sosial, politik, pemerintahan, komunikasi dan juga perspektif hubungan internasional.



Kantor Pusat :

Jln. Kelurahan Karangwaru Lor TR II/221E Kota Yogyakarta 55241



grepublishing.com



GrePublishing



@republising



gre-publishing



9

786027

677425